

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, Hal, 7	Rabu, 15 Januari 2020	Ratusan Triliun Bakal Mengucur ke Jateng	Sekitar 270 proyek senilai Rp 353,4 triliun bakal menyebar ke penjuru Jawa Tengah dalam 5 tahun mendatang
2	Bisnis Indonesia, Hal, 19	Rabu, 15 Januari 2020	Operasi Seksi II Berpotensi Berpotensi Molor	Seksi II Jalan Tol Depok-Antasari direncanakan mulai beroperasi pada Februari setelah sempat molor sekitar 7 bulan dari target awal Juli 2019
3	Kompas, Hal Jendela 1	Rabu, 15 Januari 2020	Satu Juta Hektar DAS di Kalbar Dalam Kondisi Kritis	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kalimantan Barat banyak yang dalam kondisi kritis. Rehabilitasi lebih mafit mendesak dilakukan untuk mencegah kehancuran yang kian parah
4	Media Indonesia, Hal 10	Rabu, 15 Januari 2020	Berita Foto	Pembangunan Tol Cibitung-Cilingcing: Pembangunan tol Cibitung-Cilingcing di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Proyek pembangunan tol tersebut merupakan bagian dari ruas Tol JOOR (Jakarta Outer Ring Road) II yang memiliki panjang 34 KM
5	Media Indonesia, Hal 2	Rabu, 15 Januari 2020	Penanganan Banjir Berbasis DAS Ditingkatkan	Tindakan teknis antisipasi banjir, mulai dari pembuatan bangunan pengendali banjir seperti waduk, bendungan, dan juga normalisasi saluran sungai
6	Media Indonesia, Hal 8	Rabu, 15 Januari 2020	Multifungsi di Tol Semarang-Demak	Tol baru akan mawadahi potensi industry di Pantura, Jawa Tengah dan Jawa Timur
7	Koran Tempo, Hal 4	Rabu, 15 Januari 2020	Jawa Barat Habiskan Rp 10 Triliun Tangani Banjir	Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyatakan dana pemerintah yang dikeluarkan untuk menangani banjir di Jawa Barat sebesar Rp 10 Triliun

Judul	Ratusan Triliun Bakal Mengucur ke Jateng	Tanggal	Rabu, 15 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal, 7		
Resume	Sekitar 270 proyek senilai Rp 353,4 triliun bakal menyebar ke penjuru Jawa Tengah dalam 5 tahun mendatang		

► PERCEPATAN PEMBANGUNAN

# Ratusan Triliun Bakal Mengucur ke Jateng

Bisnis, SEMARANG — Sekitar 270 proyek senilai Rp353,4 triliun bakal menyebar ke penjuru Jawa Tengah (Jateng) dalam 5 tahun ke depan.

Edi Suwiknyo  
edi.suwiknyo@bisnis.com

Rencana pelaksanaan proyek tersebut menjadi strategi pemerintah guna mempercepat roda perekonomian Jateng.

Kendati demikian, hasil identifikasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dari 270 proyek yang diusulkan hanya 107 proyek yang akan masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.

Dalam dokumen yang diterima *Bisnis*, 107 proyek yang bakal masuk RPJMN dibagi dua kategori yakni 68 proyek yang telah memiliki keterkaitan dengan *major project* atau proyek utama dan 39 lainnya diakomodasi dalam matriks pembangunan RPJMN 2020 - 2024.

Dokumen itu juga mengungkapkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, ada tiga kawasan yang menjadi bagian prioritas percepatan pembangunan. *Pertama*, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur salah satu proyek utamanya di Borobudur. *Kedua*, pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK). *Ketiga*, Pengembangan Kawasan Industri Brebes (KIB).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo menyebut kendati saat ini baru 107 yang terakomodasi, Pemprov Jateng berupaya untuk memasukan proyek-proyek yang belum sempat masuk dalam rancangan RPJMN 2020 - 2024.

"Sebanyak 107 itu hasil koordinasi terakhir saya akhir bulan lalu. Kami ingin menambah karena RPJMN baru disahkan pada tanggal 20 [Januari

► Skema pembiayaan 270 proyek senilai Rp353,4 triliun tersebut dilakukan dengan berbagai skema termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.

besok," kata Prasetyo saat ditemui *Bisnis*, Senin (13/1).

Prasetyo menjelaskan bahwa 107 proyek tersebut, merupakan proyek-proyek yang memiliki nilai besar. Beberapa proyek yang dimaksud mencakup pembangunan jalan Tol Solo - Yogya hingga *refinery development master plan* (RDMP) kilang minyak Pertamina di Cilacap. Sedangkan 163 proyek yang tidak masuk dalam RPJMN, proyek-proyek tersebut akan masuk dalam rencana strategis (renstra) kementerian atau lembaga secara tahunan.

Adapun, terkait dengan percepatan pembangunan di Jawa Tengah, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden No.79/2019. Dalam perpres yang diterbitkan tahun lalu, pemerintah telah menetapkan 270 proyek yang diharapkan dalam lima tahun ke depan bisa direalisasikan di Jawa Tengah.

Selain menetapkan jenis proyek yang bakal dibangun, melalui Perpres itu pemerintah juga telah menetapkan skema pembiayaannya.

Prasetyo menjelaskan skema pembiayaan 270 proyek senilai Rp353,4 triliun tersebut dilakukan dengan berbagai skema termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.

Porsi KPBU terhadap total keseluruhan proyek cukup besar yakni mencapai 42,56% atau senilai Rp150,4 triliun. Total estimasi investasi tersebut digunakan untuk memuat 31 usulan proyek.

Adapun sisanya dibagi dalam tiga skema pembiayaan yakni dari Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp46,1 triliun atau 13,07% yang mencakup 205 usulan kegiatan, pendanaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, dan swasta mencapai Rp156,7 triliun atau 44,35%, serta APBD yang nilainya paling kecil yakni Rp100 miliar atau 0,03% dari total keseluruhan proyek.

Prasetyo menjelaskan proyek-proyek dan skema pembiayaannya merupakan salah satu bagian dari rencana besar pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan di Jawa Tengah. Pembangunan jalan tol, pembangunan pipa gas, hingga pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) akan mendukung operasional di pusat-pusat ekonomi Jawa Tengah.

"Semuanya adalah infrastruktur dasar. Untuk KPBU maupun swasta, semuanya sudah komitmen, jadi setelah nanti musyawarah perencanaan pembangunan [Musrenbang] bisa direalisasikan," jelasnya.

Pemprov Jateng saat ini terus menyalir proyek-proyek yang berpotensi dibiayai dengan skema KPBU. Namun demikian, Prasetyo juga realistis, tak semua proyek bisa dilaksanakan dengan skema pembiayaan tersebut. Apalagi untuk masuk KPBU ada batas minimal yang harus dipenuhi.

## TUNGGU REALISASI

Pengusaha di Jawa Tengah menyambut baik rencana masuknya proyek-proyek tersebut. Selain minta pihak swasta dilibatkan, pelaku usaha juga berharap agar pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan berbagai proyek yang sudah direncanakan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi menuturkan percepatan pembangunan memang akan mendorong geliat pelaku usaha di Jawa Tengah. Namun demikian, berbagai pekerjaan rumah lainnya terkait dengan kepastian usaha juga perlu dibenahi karena saat ini dunia usaha sedang dalam kondisi yang kurang menguntungkan. **▲281**

Judul	Operasi Seksi II Berpotensi Berpotensi Molor	Tanggal	Rabu, 15 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal, 19		
Resume	Seksi II Jalan Tol Depok-Antasari direncanakan mulai beroperasi pada Februari setelah sempat molor sekitar 7 bulan dari target awal Juli 2019		

## ► TOL DEPOK ANTASARI

# Operasi Seksi II Berpotensi Molor

Bisnis, JAKARTA — Seksi II jalan tol Depok-Antasari (Desari) yakni Brigif-Sawangan direncanakan mulai beroperasi pada Februari setelah sempat molor sekitar 7 bulan dari target awal Juli 2019. Namun, ada kemungkinan akan sedikit mundur sebagai dampak kecelakaan konstruksi pada Oktober 2019.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan pihaknya akan terus memantau kesiapan Seksi II dari ruas tol yang dikelola oleh PT Citra Wasphtowa, anak usaha PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

“Kita pantau terus dan supervisi kalau ada hambatan,” ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (14/1).

Dia juga memastikan bahwa kegagalan pengecoran pada Oktober tahun lalu yang berdampak pada penghentian sementara pekerjaan konstruksi di Seksi II, kini sudah beres

dan pekerjaan konstruksi sudah berjalan normal.

Danang tidak menampik bahwa progres penyelesaian pekerjaan tersebut sedikit tertunda karena ada arahan atau perintah Komite Keselamatan Konstruksi (K2) Kementerian PUPR yang harus dipenuhi. *Bisnis* mencatat, pekerjaan konstruksi Seksi II Tol Desari bisa dilanjutkan setelah revisi desain *shoring*/perancah untuk Ramp 8 dan desain perkuatan perancah untuk Ramp 5 diserahkan, diperiksa, dan disetujui oleh Komite K2.

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) saat *public expose* sempat menyebutkan tol Desari seksi II akan beroperasi pada kuartal I/2020. Namun, ketika dikonfirmasi kembali terkait kesiapan operasionalnya, CMNP belum memberikan informasi terkini.

Dari paparan perusahaan, diketahui pula seksi III Tol Desari yakni Sawangan-Bojong

Gede, dan seksi IV Bojong Gede-Salabenda direncanakan beroperasi pada 2021.

Jika seluruh ruas tol Desari beroperasi sepenuhnya, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas tiga pusat ekonomi yakni Jakarta, Depok, dan Bogor.

Sementara itu, upaya jalan pintas dalam pembangunan jalan tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas) yakni tanpa melalui proses prakualifikasi lelang, menurut Danang, masih terus dibahas dan dikaji karena berbenturan dengan regulasi.

Regulasi tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 38/2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Pada Pasal 28 disebutkan Pelelangan atau Penunjukan Langsung harus dilakukan melalui prakualifikasi kendati diinisiasi atau diprakarsai badan usaha.

(Aprianus Doni T.)

Judul	Satu Juta Hektar DAS di Kalbar Dalam Kondisi Kritis	Tanggal	Rabu, 15 Januari 2020
Media	Kompas, Hal Jendela 1		
Resume	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kalimantan Barat banyak yang dalam kondisi kritis. Rehabilitasi lebih masif mendesak dilakukan untuk mencegah kehancuran yang kian parah		

# SATU JUTA HEKTAR DAS DI KALBAR DALAM KONDISI KRITIS

Daerah aliran sungai atau DAS di Kalimantan Barat banyak yang dalam kondisi kritis. Rehabilitasi lebih masif mendesak dilakukan untuk mencegah kehancuran yang kian parah.

Emanuel Edi Saputra

**D**ata Balai Pengkaji DAS dan Hutan Lingsing Kapuas, dari sekitar 14 juta hektar (ha) luas DAS di Kalbar, sekitar 1,8 juta ha dalam kondisi kritis. Sedangkan besar yang kritis di DAS Kapuas di sepanjang 1.143 kilometer.

Kapuas Balai Pengkaji DAS dan Hutan Lingsing Kapuas Esti Rochayanti mengungkapkan, kondisi kritis DAS Kapuas yang kritis tampak dari banjir yang sering terjadi di wilayah hilir. Hal ini sinyal adanya kondisi kritis di hulu. Pada saat yang sama, air sungai juga keruh.

"Kerus telah melakukan upaya rehabilitasi. Namun, jika degradasi lebih cepat daripada upaya rehabilitasi, rehabilitasi memerlukan waktu yang lama karena proses pemulihan sendiri memerlukan waktu," ujar Esti.

Pada 2017, upaya rehabilitasi dilakukan di DAS Kapuas sebesar 800 ha. Pada 2018 dilakukan rehabilitasi sebesar 300 ha. Kemudian, ditargetkan pada 2019 sebesar 1.000 ha.

Rehabilitasi dilakukan dengan menanam pohon berjenis akasia, mimba, jati dan jati. Ada juga pohon bambu. Upaya rehabilitasi dilakukan berkelompok.

Rehabilitasi itu dilakukan di beberapa kabupaten yang dilintasi Kapuas dan melibatkan berbagai pihak. Tak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat. Maka, kawasan yang ditaman juga yang memiliki elemen lain masyarakat.

rihat.

Kondisi yang lebih memprihatinkan ditangkap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalbar. Dari luasan DAS Kapuas dan sub-DAS Kapuas yang total mencapai 10 juta ha, sekitar 70 persennya dinyatakan dalam kondisi kritis.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Kalbar Nikodemus No, banjir semua DAS di 14 kabupaten/kota di Kalbar mengalami degradasi. "Kondisi sungai berubah. Debit air berubah. Hal itu terjadi karena DAS rusak karena aktivitas pertambangan lahan untuk pertambangan emas ilegal dan perkebunan. Akibatnya itu berakibat banjir sungai," ungkap Nikodemus.

Bahkan, di kawasan perunggu yang menjadi sumber air juga digarap. Aktivitas itu masuk ke sungai.

Perubahan itu tidak menimbulkan aspek keberlanjutan sungai. Dominasi perkebunan sampai di bantaran sungai.

"Kapuas sebagai DAM utama memelihara lahan degradasi lingkungan dari semua sub-DAS. Sebab praktik pertambangan ilegal juga terjadi di sub-DAS. Semua mengalir ke Kapuas," ujarnya.

Penggunaan zat kimia dari aktivitas pertambangan ilegal di sub-DAS semuanya tumpah ke Kapuas. Itu memengaruhi kualitas masyarakat yang dilintasi Kapuas. Padahal, masyarakat sudah mengadopsi air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Saat Kapuas menyuarai beberapa lokasi di Kapuas, bantaran sungai banyak yang longsor akibat pertambangan emas ilegal. Bantaran sungai ada yang tergerus hingga 10-20 meter ke arah



Kapal wisata melintasi Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (4/12/2019).

daerah. Kondisi seperti itu ditemukan di sejumlah lokasi yang terpencar.

Pohon di bantaran Kapuas banyak tumbuh ke sungai. Pohon-pohon itu sebelumnya menjadi tempat mendirikan tali rami yang berisi alat pemancing emas. Ada pula pohon yang tumbuh akibat bantaran sungai yang longsor.

Selain aktivitas pertambangan emas ilegal, ada pula perkebunan sawi di bantaran Kapuas. Jenis lahan luas beberapa meter dari sungai. Hasilnya minimal berkinerja 20-300 meter dari sungai. Hal itu berpotensi mengotori sungai karena paparan busa menyekat.

## Semua pihak

Penyusunan DAM memerlukan kerja sama semua pihak. Yang bertanggung jawab tidak hanya forum DAS. Penyelamatan sungai juga memerlukan kebijakan dari Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi, serta Dinas Kehutanan.

Di satu sisi, Walhi terus berperan mengawasi, memberikan pendampingan masyarakat, serta mendampingi jika ada kasus yang dapat merusak sub-DAS.

Gies Bono Pabulias Perikanan Magister Ilmu Lingkungan Universitas Tanjungpura, Pontianak, Gesti Anshari memutarakan, Kapuas juga

konsekuensi hayati. Di situ juga terdapat bahan-bahan tambang, misalnya emas.

Kondisi Kapuas tidak lepas dari bentang alam di sekitarnya yang terdiri dari hutan dan gambut. Di saat kawasan hutan dan gambut di sekitarnya sudah rusak, sistem hidrologi di Kapuas turut terganggu.

"Melihat sungai, harus dilihat bentang alam di sekitarnya juga. Jika gambut dan hutan rusak, tidak bisa menyimpan air. Dengan kondisi bentang alam yang rusak, air semuanya masuk ke sungai," katanya.

Selain itu, saat musim kemarau debit air cepat berkurang. Kalau musim hujan, air sungai cepat naik. Hal itu karena kondisi bentang alamnya tidak mendukung lagi. Akibat, di hulu pernah ada penambangan kayu kar serta kemarau lahan.

Demari kondisi itu, menurut dia, pemerintah bisa menang DAM menjadi penting. Pihak ada kebijakan mana kawasan yang dilindungi dan yang harus dikonsevasi. Perizinan yang tidak sesuai penutupan lahan diberikan.

"Banyak perizinan diperpanjang karena banyak masyarakat yang bergantung dari sungai. Itu semuanya dalam suatu kebijakan," ajarnya.

Upaya penyelamatan DAS perlu dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah. Pada saat yang sama, keratif lokal menjadi lingkungan bisa dipertahankan. Misalnya, penanaman hutan adat untuk menjaga kelestarian daerah dan sungai.

Bonus terbagi itu diperlukan untuk pemuliharaan DAS yang kritis di wilayah Kalbar.

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Rabu, 15 Januari 2020
Media	Media Indonesia, Hal 10		
Resume	Pembangunan Tol Cibitung-Cilingcing: Pembangunan tol Cibitung-Cilingcing di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Proyek pembangunan tol tersebut merupakan bagian dari ruas Tol JOOR (Jakarta Outer Ring Road) II yang memiliki panjang 34 KM		



ANTARA / FARIDI HERMANSYAH

**PEMBANGUNAN TOL CIBITUNG-CILINCING:** Pembangunan Tol Cibitung-Cilingcing di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Proyek pembangunan Tol Cibitung-Cilingcing merupakan bagian dari ruas Tol JOOR (Jakarta Outer Ring Road) II yang memiliki panjang 34 km.

Judul	Penanganan Banjir Berbasis DAS Ditingkatkan	Tanggal	Rabu, 15 Januari 2020
Media	Media Indonesia, Hal 2		
Resume	Tindakan teknis antisipasi banjir, mulai dari pembuatan bangunan pengendali banjir seperti waduk, bendungan, dan juga normalisasi saluran sungai		



## Penanganan Banjir Berbasis DAS Ditingkatkan

PENCEGAHAN dan penangan bencana banjir berbasis daerah aliran sungai (DAS) dilakukan dengan penataan ruang wilayah dan penggunaannya secara proporsional, pembuatan bangunan pengendali banjir, revegetasi di lahan pascatambang, dan pengekangan hutan.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kepada wartawan sesuai Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS di Gedung Manggala Wundulaki, Jakarta, Senin (13/1).

Dalam rakernis itu Menteri LHK juga menyampaikan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menggejutkan upaya RHL

harus ditingkatkan demi memulihkan lingkungan.

"Rapak Presiden menegaskan secara khusus, RHL harus ditingkatkan berkali-kali lipat sebagai upaya untuk pemulihan lingkungan," tambah Siti.

Radir pada rakernis tersebut seluruh pemimpin Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan DAS di seluruh Indonesia, Merika memcermati paparan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait dengan pola iklim di 2020. Menteri LHK pun memulai evaluasi kegiatan RHL 2019 dan rencana pada 2020 dari seluruh UPT tersebut.

Di acara yang sama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan

Tata Lingkungan Kementerian LHK Sigit Harwisanto mengatakan upaya mewujudkan penanganan banjir berbasis DAS itu harus melalui tindakan sipil teknis dan vegetatif. "Contoh tindakan sipil teknis, yakni pembuatan bangunan pengendali banjir seperti waduk, bendungan, juga normalisasi saluran sungai."

Untuk tindakan vegetatif, lanjut Sigit, dengan melaksanakan kegiatan RHL dan bangunan KTA melalui penghijauan dan reboisasi, juga revegetasi di lahan pascatambang.

Sigit juga menekankan, penegakan hukum harus dilakukan. Penyempangan atas tata ruang dan ekstraksi sumber daya alam yang ilegal mesti ditindak tegas.

Sementara itu, dalam rapat dengan pendapat bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pimpinan Komisi VII DPR Yandri Susanto, mengatakan perlu melakukan evaluasi total dalam penanganan serta penanggulangan bencana untuk meminimalisasi ancaman atau risiko bencana, bahkan memegahnya.

"Penanganan korban harus dilakukan dengan cepat sesuai standar minimum pelayanan dan proses pemulihan atau rehabilitasi. Rekonstruksi dilakukan dengan cepat," jelasnya dalam rapat terkait penanganan dan penanggulangan bencana serta sip benteng di Gedung Nusantara 2 DPR, Jakarta, kemarin. (FeX-7)

Judul	Multifungsi di Tol Semarang-Demak	Tanggal	Rabu, 15 Januari 2020
Media	Media Indonesia, Hal 8		
Resume	Tol baru akan mewadahi potensi industry di Pantura, Jawa Tengah dan Jawa Timur		

# Multifungsi di Tol Semarang-Demak

*Tol baru akan mewadahi potensi industri di pantura Jawa Tengah dan Jawa Timur.*

**AKHMAD SAFUAN**

*achmad\_sapuan@mediaindonesia.com*

**D**UA keunikan akan muncul di Tol Semarang-Demak. Yang pertama, ruas yang menjadi bagian Tol Semarang-Surabaya di jalur pantai utara itu akan memiliki tol layang yang berada di atas Laut Jawa.

Panjangnya mencapai 8 kilometer dengan tinggi 5 meter dari permukaan laut. Yang kedua, tol itu juga akan menjadi bagian dari tanggul laut. Dia bisa berfungsi sebagai pencegah banjir rob yang kerap mendatangi Semarang.

"Tol Semarang-Demak telah memasuki masa pengerjaan konstruksi. Untuk tahap awal, kami memulainya di seksi II, ruas Sayung-Demak sepanjang 16,31 kilometer," ungkap Dirut PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak, Handoko Yudianto, di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Total ruas tol ini mencapai panjang 27 kilometer, yang terbagi dalam dua seksi. Seksi I menghubungkan Semarang-Sayung. Untuk seksi II, pekerjaan konstruksi ditargetkan

tuntas pada akhir 2021. "Lahan yang sudah dibebaskan mencapai 60%," imbu Handoko saat menemui Gubernur Ganjar Pranowo.

PT PP Semarang Demak merupakan badan usaha yang mengurus tol ini. Dia dibentuk konsorsium tiga perusahaan, yakni PT PP Perumahan dan Wijaya Karya, serta Misi Mulia Metrical, badan usaha swasta. Total investasi mencapai Rp15,3 triliun, dengan Rp5,4 triliun di antaranya untuk seksi II.

Ganjar berharap seksi I juga segera dibangun. "Saat ini masih terkendala pembebasan lahan. Kami berharap ada percepatan."

Meski sudah menuntaskan Tol Trans-Jawa, Jakarta-Semarang-Solo-Surabaya, pemerintah juga memprogramkan tersambunginya kawasan industri di pantura Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tol sirip ini akan menghubungkan Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Ngasem-Tuban-Surabaya.

Warga di Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas, Jawa Tengah, juga akan lebih mudah berhubungan dengan rampungnya pembangunan jembatan di Kecamatan Susukan, Banjarnegara. Jembatan yang menuju Bandara Jenderal Besar Soedirman, Wirasaba, Purbalingga, itu membuat warga Banjarnegara tidak perlu memutar lagi untuk menuju Banyumas. "Dengan adanya jembatan itu, akses dari daerah di arah selatan ke bandara semakin mudah," ujar juru bicara

Pemkab Purbalingga, Prayitno.

## Bangun dermaga

Di Sumatra Barat, meningkatnya animo warga untuk berwisata membuat Pemerintah Kota Padang bergiat membenahi infrastruktur di wilayahnya. Salah satunya dengan membangun dermaga di Sungai Pisang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, tahun ini.

"Pembangunan dermaga akan memudahkan akses ke sejumlah pulau di perairan Kota Padang. Dermaga akan dibangun terapung dengan dana APBD kota sebesar Rp2,6 miliar," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Medi Iswandi.

Menurut dia, kebutuhan dermaga untuk penunjang fasilitas transportasi pariwisata di kawasan itu sangat penting dan mendesak. Pasalnya, lokasi bakal dermaga merupakan titik terdekat untuk akses menuju sejumlah pulau di perairan Bungus yang memiliki sejumlah objek wisata menarik.

Sementara itu, di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, tahun ini pemerintah kabupaten masih berkonsentrasi membangun jalan dan jembatan, juga proyek air bersih serta irigasi. Tahun ini alokasi anggaran untuk ketiga bidang yang berasal dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum meningkat dari tahun lalu. "Pembangunan jalan dan jembatan mendapat dana lebih besar," papar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dominikus Demon. (L.D/YH/FB/N-2)

Judul	<b>Jawa Barat Habiskan Rp 10 Triliun Tangani Banjir</b>	Tanggal	Rabu, 15 Januari 2020
Media	Koran Tempo, Hal 4		
Resume	Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyatakan dana pemerintah yang dikeluarkan untuk menangani banjir di Jawa Barat sebesar Rp 10 Triliun		

PERISTIWA

## Jawa Barat Habiskan Rp 10 Triliun Tangani Banjir

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dana pemerintah yang dikeluarkan untuk menangani banjir di Jawa Barat sebesar Rp 10 triliun.

EDISL 15 JANUARI 2020



Petugas mengevakuasi warga korban banjir di Taman Villa Kartini, Bekasi, Jawa Barat, 2 Januari lalu. TEMPO/Ahmad Tri Hawsari

**BANDUNG** - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dana pemerintah yang dikeluarkan untuk menangani banjir di Jawa Barat sebesar Rp 10 triliun. "Dana itu fokus dulu di daerah hulunya, untuk menahan air," kata dia di Bandung, kemarin,

Ridwan Kamil mengatakan mayoritas dana tersebut untuk membiayai infrastruktur pengendali air guna menahan banjir. Lokasinya tersebar di antaranya di Bogor, Bandung Raya, Bekasi, serta Karawang.

Di Kabupaten Bogor, misalnya, proyek bendungan Ciawi dan Sukamahi yang diminta Presiden Joko Widodo beroperasi tahun ini. "Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang bisa mengendalikan 30 persen air ke Jakarta itu nilainya Rp 3,9 triliun," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan proyek bendungan juga tengah disiapkan untuk mengendalikan banjir di Bekasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjanjikan dana Rp 4,6 triliun.

Ridwan Kamil mengatakan untuk pengendali banjir Karawang akan dibangun Bendungan Cibect dengan biaya Rp 800 miliar. "Bendungan sudah siap, tinggal pembebasan lahan," kata dia.

Adapun sisanya untuk membiayai penanganan banjir akibat luapan Sungai Citarum. "Sisanya adalah Citarum. Ada terowongan Nanung, ada danau retensi Cieunteung sudah selesai. Kemudian danau retensi Andir baru mulai lelang, seluas Cieunteung," kata Ridwan Kamil.

Kementerian PUPR juga membangun sodetan Sungai Cisangkuy untuk mengurangi debit banjir Sungai Citarum di daerah Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. "Tadinya Cisangkuy ini memuntahkan air ke Citarum-Dayeuhkolot, sekarang tinggal 5 persen karena dibelokin melewati Dayeuhkolot," kata Ridwan.

Dia mengatakan penanganan banjir Sungai Citarum juga menasar lokasi banjir di Rancaekek yang genangan airnya kerap memutus lalu lintas dari Bandung menuju Garut. Infrastruktur pengendali banjir diklaimnya sudah tuntas. **AHMAD FIKRI**